

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Fajar Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- H.M. Agus Santoso, 2015, *Hukum. Moral dan keadilan*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Indroharto dalam Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara.
- M. Luthfan Hadi Darius, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press.
- M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Surabaya : universitas airlangga.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsan Huma.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Tata Cara Perpindahan Notaris.

JURNAL

Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, hlm. 391-404, Desember 2012.

Roeri Andriana, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 4 NO. 2 Juni 2017, Semarang.

Susi Dewi Kemala, *Pelaksanaan Pindah Tempat Kedudukan Notaris Dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2016.

